

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Black Law Dictionary, *Corruption Entry* (St. Paul: West Publishing, 2010)

Dwi Aprillia Sari, *Peran Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2020)

Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta bekerja sama dengan PuKAP-Indonesia, 2012.

Imran, M. Fadil. *Hukum Pidana*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional

Irwansyah Putra, *Analisis Yuridis Hubungan Kelembagaan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2021)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Kamus Besar Bahasa Indonesia & Kamus Hukum Black's Law Dictionary (edisi terjemahan).

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 2020)

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2007)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019)

Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2014)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 2018)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020)

Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)

Nurul Istiqomah, *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UPN Veteran, 2022)

Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: Yuridika Press, 2020)

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006)

Rahmat Hidayat, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh POLRI dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018)

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)

Romli Atmasasmita, *Teori Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), 102.

Sinurat, Aksi. Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 2013)

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

Wardana, Surya Kusuma. *Hukum Pidana*. Jakarta Utara: Penerbit Buku Indonesia, 2025.

Wau, Anggriani, Muhamad Sadi Is, Lia Hartika, Ferdinandus Ngau Lobo, Sri Agustini, Widya Yoseva, Edwin Yuliska, July Esther, Danel Aditia Situngkir, Santi Indriani, Fahmi Miftah Pratama, Abdul Hajar Anwar, Gokma Toni Parlindungan S, Windi Arista, Harniwati, dan Chintara Faradifta. *Hukum Pidana*. Editor Ermanto Fahamsyah. Badung, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2022.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

B. Jurnal

Bachri, Syamsul. "Kewenangan Kejaksaan terhadap Tindak Pidana Korupsi atas Kerugian Keuangan Negara." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 1 (2020): 1026–1039.

Jurnal: *Fiat Justisia*, *Jurnal Hukum Progresif*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.

Karya, Anjasra. "Kewenangan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca MoU dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2023).

Kurniawan, Rudy Cahya. "Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 3 (2018).

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2011)

Satriya. "Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 1 (2019).

C. Peraturan Perundang-undangan

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Penindakan Korupsi 2023*, Jakarta: KPK RI, 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi, Op. Cit

KPK RI, *Laporan Tahunan Penindakan dan Pencegahan*, (Jakarta: KPK, 2023)

KUHAP, Pasal 1 angka 2.

KUHAP, Pasal 1-5.

KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf g.

Putusan MA No. 537 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan PN Tipikor No. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK jo. UU No. 19 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana disebutkan:

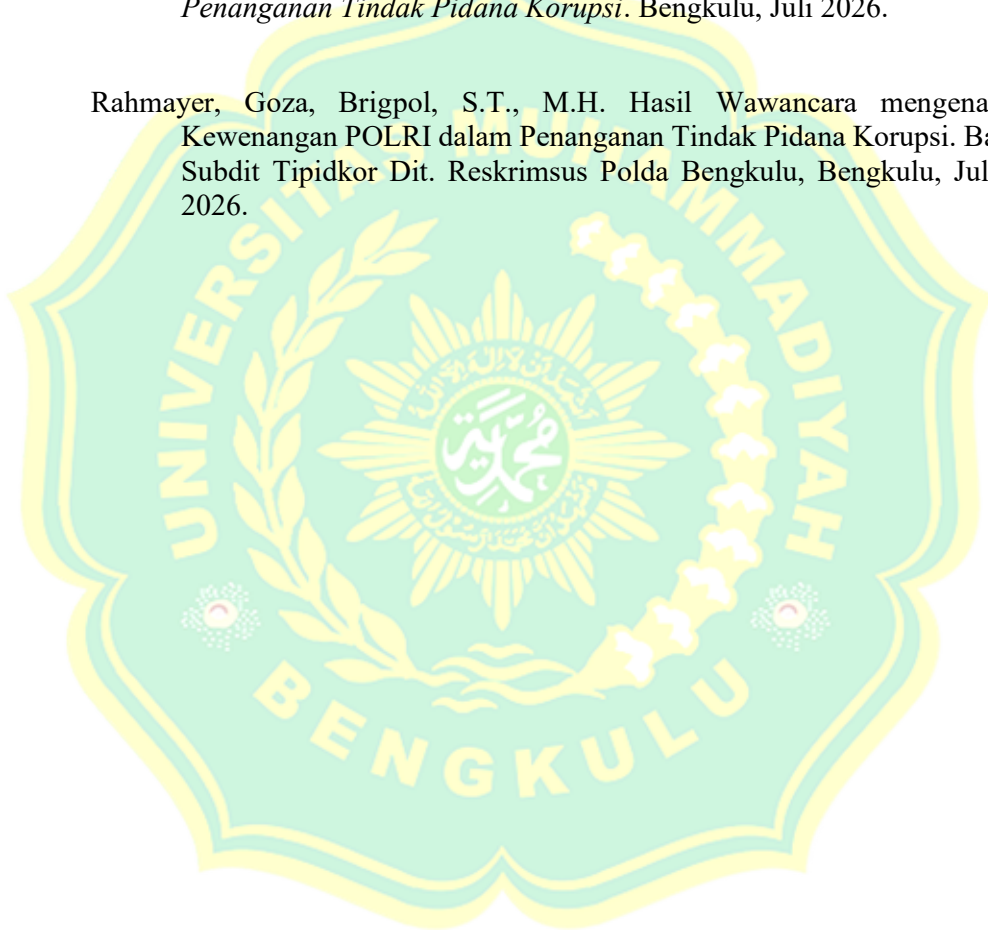
UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun 2004, UU Tipikor, dan KUHAP.

D. Sumber Wawancara

Gunawan, Mirza, Kopol, S.I.K., M.H. Hasil Wawancara mengenai Kewenangan POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Kasubdit 3 Tipidkor Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu, Bengkulu, Juli 2026.

Hasanah, Uswatun, S.H. Kasubsi II Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu. Wawancara oleh penulis mengenai *Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Bengkulu, Juli 2026.

Rahmayer, Goza, Brigpol, S.T., M.H. Hasil Wawancara mengenai Kewenangan POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Ba Subdit Tipidkor Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu, Bengkulu, Juli 2026.



L

A

M

P

I

R

A

N





Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber POLRI, Kompol Mirza Gunawan, S.I.K., M.H. dan Brigpol Goza Rahmayer, S.T., M.H., Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu.



Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Kejaksaan Negeri Bengkulu, Uswatun Hasanah, S.H., Kasubsi II Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu.